BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Fasilitasi Pilkada yang merupakan input pada kualitas layanan Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat pada proses fasilitasi, penting untuk dilakukan secara berkesinambungan, dengan kualitas fasilitasi yang baik maka akan ada data atau gambaran mengenai bagaimana tingkat perkembangan Pilkada di Provinsi Jawa Barat, dengan nampaknya gambaran tersebut maka secara langsung dapat memberikan kemudahan bagi Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat dalam menjalankan program fasilitasi.

Pilkada secara langsung merupakan disain kelembagaan untuk mempercepat proses pematangan demokrasi di daerah. Kehidupan demokrasi di tingkat lokal menjadi lahan praktek bagi mewujudkan semangat multikulturalisme yang sangat dibutuhkan bagi terwujudya harmonisasi dalam etnis pada pemerintahan demokratis.

Pilkada merupakan salah satu media pembelajaran demokrasi bagi masyarakat daerah dan sekaligus untuk terwujudnya hak-hak esensial individu seperti kesamaan hak politik dan kesempatan untuk menempatkan posisi individu dalam pemerintahan daerah. Pilkada telah menuntun pemimpin untuk secara konsistem menjalin hubungan dengan konstituen yang salah satunya diwujudkan melalui optimalisasi anggran daerah bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada fasilitasi Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat menemukan permasalahan salah satunya masih masih ada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya Tahun 2012, berikut adalah kesimpulan hasil fasilitasi Pilkada Walikota dan Wakil Walikota kota Tasikmalaya Tahun 2012:

1. Hasil pemantauan di lapangan, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya masa Jabatan 2012-2017 Tahun 2012 hanya mencapai 80,2 %, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan keraguan masyarakat untuk menentukan pemimpin di daerahnya sendiri;
2. Masyarakat Kota Tasikmalaya relatif baik dalam menggunakan hak pilihnya;
3. Situasi dan kondisi di lapangan sangat kondusif.

4.2. Saran

Fasilitasi Pilkada sejatinya bila dilakukan dengan proses yang baik dan tentunya dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan tentu tidak akan menutup kemungkinan menjadi suatu jawaban dalam penyelesaian masalah Pilkada di Provinsi Jawa Barat, untuk memperbaiki Peran Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat, disini penyusun akan memaparkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat seharus melakukan fasilitasi pemantauan lebih luas lagi bukan hanya ke tiga TPS;
2. Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat harus melakukan pelatihan-pelatihan bagi para aparaturnya, untuk meningkatkan peranan aparaturnya demi meningkatkan kualitas Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat itu sendiri, khususnya dalam fasilitasi Pilkada di Jawa Barat.
3. Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Tasikmalaya secara bertahap serta berkesinambungan, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Kota Tasikmalaya mengenai pentingnya menggunakan hak pilih agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan lancar.